



Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja Ahmad Mufaris Bicara Soal APBD TA 2024

## Bersifat Terbuka, Masyarakat Harus dan Wajib Tahu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta ditetapkan setiap tahun. APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 telah disahkan menjelang akhir 2023 lalu. Resmi berlaku mulai 1 Januari 2024.



Semua program dan kegiatan itu ada di APBD yang sifatnya terbuka. Masyarakat harus dan wajib tahu."

**AHMAD MUFARIS**  
 Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta

ADA banyak program dan kegiatan prarakyat yang disepakati Pemerintah Kota Yogyakarta bersama DPRD Kota Yogya untuk dilaksanakan. Di antaranya, anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, pemuda, dan penguatan ketahanan keluarga.

"Semua program dan kegiatan itu ada di APBD yang sifatnya terbuka. Masyarakat harus dan wajib tahu," ucap Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Ahmad Mufaris.

Adapun program dan kegiatan yang pro rakyat itu antara lain seperti jaminan pendidikan daerah (JPD), asuransi kesehatan, bantuan mengambil ijazah yang ditahan sekolah dan bantuan untuk pemakaman warga.

Tahun ini APBD Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran Rp 5,5 miliar untuk mengkaver asuransi kesehatan bagi anak-anak. Pertimbangannya, BPJS Kesehatan baru untuk orang tua ayah dan ibu. Andis, sapaan akrab Mufaris, menyarankan bagi warga yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan segera mendaftar. Tak ada yang sulit. Dia meyakinkan prosesnya sederhana dan cepat. Tiga hari sudah kelar.



**PRO RAKYAT:** APBD TA 2024 Kota Yogyakarta mengalokasikan berbagai anggaran untuk kepentingan pendidikan. Di antaranya, jaminan pendapatan daerah (JPD) dan bantuan mengambil ijazah yang tertahan di sekolah. Foto ilustrasi kegiatan awal masuk sekolah di salah satu SMP di Kota Jogja.

Sejak 2020, DPRD Kota Yogyakarta menyepakati anggaran Rp 52 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan bagi seluruh warga Kota Jogja di kelas tiga. Alokasi anggaran tersebut berdasarkan hitungan jumlah seluruh penduduk Kota Jogja. Satu keluarga semuanya dikaver asalkan bersedia dirawat di kelas tiga. Bagi warga yang terdaftar sebagai peserta BPJS mandiri, dapat bermigrasi ke Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Selain itu, ada anggaran bantuan mengambil ijazah

yang tertahan di sekolah. TA 2024 ini dialokasikan anggaran Rp 4,5 per siswa bagi 1.200 murid. Totalnya mencapai Rp 5,4 miliar. Dari anggaran itu terdapat kenaikan sebesar Rp 3 juta per siswa dibandingkan tahun lalu. TA 2023 disediakan anggaran bagi 800 pelajar dengan anggaran mencapai Rp 2,4 miliar. "Kenaikan anggaran lebih dari separo dibandingkan tahun lalu," terang wakil rakyat yang tinggal di Mantrijeron ini.

Dengan besarnya anggaran itu, Andis tak ingin ada ijazah

siswa yang ditahan atau tertahan di sekolah karena alasan biaya. Syarat mendapatkan bantuan mengambil ijazah harus mengajukan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Kembali soal pemanfaatan BPJS Kesehatan, Andis wanti-wanti bagi pelajar tidak boleh terkait dua hal. Perkelahian dan menggunakan minuman keras atau alkohol. Kalau ketahuan karena dua hal itu tidak mungkin bisa dikaver. Sebagai wakil rakyat, Andis membuka pintu rumahnya terbuka 24 jam bagi

masyarakat. Baik yang memerlukan bantuan, mengadakan masalah atau ingin menyampaikan aspirasi. Keterbukaan dengan pemilihnya selalu dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan turun ke bawah. Secara periodik, Andis menggelar reses Masyarakat bisa menyampaikan banyak hal. Andis siap mengawal dan memperjuangkan setiap aspirasi. "Kami realisasikan dalam program dan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat," katanya. (kus/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Januari 2025  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005